BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gerakan 30 September 1965 dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia bentukan Suharto adalah merupakan kekejaman luar biasa yang dipelopori oleh PKI, sehingga kekerasan yang bertubi-tubi dilancarkan terhadap siapapun yang terkait dengan PKI, hal ini dapat dinilai sebagai tindakan yang benar dan bahkan sangat terhormat.[1] Oleh karena itu pengejaran, pembersihan dan penghancuran masyarakat sipil yang diduga memiliki hubungan dengan PKI adalah sah dan menjadi suatu hal yang benar, meski tanpa melalui proses pengadilan. Seperti telah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia, bahwa mengejar dan menghancurkan secara massal anggota PKI adalah tidak melanggar hukum. Historiografi Orde Baru pada akhir 1965 sampai awal 1966 nyaris tidak ada menuliskan data dan informasi mengenai pembunuhan massal anggota PKI dalam bentuk arsip dan dokumen. Koran dan surat kabar Indonesia diberangus dan disensor ketat oleh Angkatan Darat dalam pekan pertama Oktober 1965.[2] Angkatan Darat menerbitkan beberapa koran-koran versinya sendiri dengan wartanya, cara-cara tanpa kekerasan dalam penumpasan PKI.[3]

ɔssa John. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta* . Jakarta: Hasta Mitra, 2008. Hlm. 26.

id. Dalih Pembunuhan Massal. Hlm. 28.

id. Dalih Pembunuhan Massal. Hlm. 29.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lengsernya Suharto sebagai presiden menandakan runtuhnya Orde Baru pada 1998, fenomena ini dapat mengubah arah historiografi Indonesia menjadi lebih demokratik. Dari sejarah adalah produk ―resmi‖ versi penguasa menuju sejarah ―alternatif‖ versi rakyat. Jelas dibutuhkan suatu usaha untuk mengubah pandangan historiografi Orde Baru yang memusatkan perhatian pada negara, agar lebih mengarah pada tujuan pemahaman dan pengalaman lokal. Gagasan dasarnya adalah historiografi mesti tidak sekedar narasi tentang pemimpin saja, raja atau pemerintah yang sarat akan distorsi, sejarah jugalah mesti bercerita tentang orang biasa atau kelompok yang dimarjinalkan, termasuk orang kalah dalam pergantian rezim.[4] Namun pandangan Orde Baru tentang kekerasan massal masih mempengaruhi Indonesia pada masa kontemporer setelah pemerintahan otoriter ini. Pemerintahan demokratis telah menghadirkan banyak perubahan bagi masyarakat Indonesia, tetapi hingga kini pemerintah belum mengakui kesalahan pada masa lalu yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa 1965. Pemerintah enggan untuk mencapai rekonsiliasi dan pelaku kekerasan massal tersebut belum diadili secara hukum. Pengakuan dan penghormatan terhadap para korban belum dilakukan, apalagi memberikan kompensasi, atau mengidentifikasi dan memberikan penghormatan di lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai kuburan massal.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ossa John, Ayu Ratih dan Hilmar Farid. *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: ni Pengalaman Korban 65*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi ɛat (Elsam), 2004. Hlm. 2.

Sejarah Gerakan 30 September 1965 beserta segala akibatnya termasuk tema penelitian yang paling sensitif dan banyak mendapat perhatian. Produksi historiografi tentang peristiwa ini melimpah, baik bersumber dari studi akademik maupun memoar dan kesaksian dari para penyintas, eks tahanan politk (Tapol).[5] Terdapat upaya memahami peristiwa Gerakan 30 September di luar dari sejarah ―resmi‖ versi pemerintah. Sebuah kondisi yang nyaris tidak pernah ditemukan pada era Orde Baru. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Geoffrey Robinson dan Jess Melvin, telah mengungkap bahwa kekerasan yang terjadi pada tahun 1965 (dan setelahnya) adalah hasil dari muslihat yang terorganisir, bukan sekadar spontanitas masyarakat seperti yang sering dijelaskan. Temuan mereka menunjukkan bahwa sebagian pihak di dalam militer terlibat dalam memprovokasi, mendukung, mengarahkan, bahkan memfasilitasi tindakan kekerasan tersebut. Selain itu, analisis Annie Pohlman juga menunjukkan bahwa kekerasan massal tahun 1965 menyasar kaum perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih muda. Melalui wawancara dan dokumentasi sejarah lisan, Pohlman menggambarkan bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut dilakukan secara sistematis dan menjadi bagian integral dari strategi kekerasan yang terorganisir.

[5] Mengenai peristiwa itu, bisa merujuk ke beberapa bacaan, antara lain; Taufik *Kamp Pengasingan Moncongloe* Jakarta: Desantara Fondation, 2009. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: LP3S, 2001. Pramoedya Γoer. *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. Jakarta: Lentera, 1995. Amurwani. *Kisah Tapol Wanita di Kamp Pengasingan Plantungan*. Jakarta: Kompas,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Istilah tahanan politik dalam kamus peribahasa dan kitab hukum di Indonesia sangat sulit ditemukan, istilah ini berkembang dalam masyarakat berikut perkembangan hukum pidana politik. Tahanan politik dapat dimaknai sebagai seseorang yang dijerat tindakan penahanan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana politik. Dengan demikian istilah tapol bermakna ganda. Pertama, status calon narapidana politik. Artinya sebelum vonis hukum dijatuhkan. Kedua, disandang oleh seseorang atau lebih hingga batas tak tertentu sampai ada putusan (politik) mengembalikan mereka ke masyarakat.[6] Berdasarkan kesalahannya tahanan politik diklasifikasikan menjadi tapol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.

Tapol Golongan A, menurut Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Laksamana Sudomo, adalah mereka yang memiliki bukti-bukti kuat untuk diajukan ke depan pengadilan. Diantaranya mereka yang didakwa terlibat langsung dalam peristiwa G 30S/PKI dan mereka yang adalah para pimpinan PKI. Jumlah kalkulasi seluruh tapol Golongan A mencapai 1967 orang. Sampai akhir tahun 1975 sebanyak 767 tahanan politik Golongan A telah menjalani proses pengadilan dan sisanya segera diadili. Mereka yang diadili diantaranya ada yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati dan hukuman penjara beberapa tahun.[7] Sedangkan tapol Golongan B adalah mereka yang bersalah menurut Jaksa Agung Soegih Arto, namun karena belum dapat dibuktikan

risnadi, I.G. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: LP3S, 2001
.

hat, *Tempo, —Ramai-Ramai Dibebaskan‖*, 13 Desember 1975.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kesalahannya tidak dibawa ke pengadilan.[8] Jumlah tapol Golongan B sebanyak 34.000 orang.[9] Sebagian besar tapol Golongan B adalah anggota organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI.[10]

Tapol Golongan C terdiri atas mereka yang tidak memiliki bukti kuat sebagai komunis. Mereka juga bukan anggota ormas-ormas yang berafiliasi dengan PKI, mereka juga bukan anggota PKI. Sebagian besar dari mereka adalah korban fitnah akibat kecemburuan sosial yang merebak sekitar tahun 1960. Kelompok ini dibebaskan lebih dulu daripada Golongan A dan Golongan B. Tapol Golongan C berjumlah 580.000 orang seluruhnya telah dibebaskan pada tahun 1977.[11]

Penjara sebagai instrumen masyarakat dalam hal mengamputasi kedurjanaan adalah salah satu penemuan baru dalam sejarah umat manusia. Penjara dirancang untuk membiarkan tubuh dalam keadaan (relatif) baik, tapi mendesakkan

---

[8] Krisnadi. I. G. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. *Op cit*. Hlm. 6.

[9] Lihat, *Tempo, —Ramai-Ramai Dibebaskan‖*, 13 Desember 1975.

[10] Organisasi-organisasi seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia pimpinan Roby Sumolang (IPPI-Roby Sumolang), Persatuan Guru Republik Indonesia Non-Vaksentral (PGRI-NV), Persatuan Wartawan Indonesia pimpinan Djawoto (PWI-Djawoto), Serikat Buruh Film dan Senidrama (SARBUFIS), dan sebagainya. XXV/MPRS/1966; Lihat Mabes ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di ı; Pemberontakan G-30-S/PKI dan Penumpasannya*. Jilid IV-A (Jakarta: arah dan Tradisi ABRI, 1994), Hlm. 71-72.

[11] Krisnadi. I. G. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. *Op cit*. Hlm. 7.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

transformasi yang hebat di tingkat pikiran, tingkah laku, dan jiwa.[12] Penjara dalam bentuknya yang mutakhir dipraktikkan secara luas oleh ―dunia beradab‖ pada umumnya. Beradab dalam tanda kutip artinya konsep ini sejatinya yang dibicarakan bukanlah perkara ―adab‖, melainkan perkara yang menjadi urusan penguasa dengan kekuasaannya baik dalam menghadapi perkara kejahatan biasa atau kriminalitas maupun terlebih-lebih, kasus ―kejahatan politik‖. Kejahatan atau kebagusan politik bukanlah perkara yang berkaitan dengan moral kemanusiaan, melainkan berhubungan lurus dengan politik penguasa yang tentunya dibarengi ganjaran hukum.[13]

Hukuman dipandang sebagai pembalasan perbuatan masyarakat atas tindak kedurjanaan yang kemudian diharapkan bisa menghalangi kelakuan durjana berikutnya dan juga tentunya sebagai jalan pertobatan bagi pelaku kejahatan untuk direhabilitasi di tengah masyarakat.

Beragam anggapan mengenai hukuman, seyogyanya ditujukan untuk memperbaiki nilai dan sikap si durjana dengan harapan para pelaku tidak akan mau—bahhkan niatpun—untuk melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang. Sebagai asumsi, tentu itu kita terima, namun yang menjadi soal adalah metode yang seperti apakah (sudut sosiologis dan sudut kejiwaan) yang mesti dipraktikkan dalam rangka menunjang perubahan atau mendukung rehabilitasi. Teori rehabilitasi belum [illegible] banyak bukti ilmiah yang mendukung kebenaran teorinya, namun teori

---

Vilson. *Dunia di Balik Jeruji* Yogyakarta: Resist Book, 2005. Hlm. 217.

Crisnadi. I. G. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979). Op cit.* Hlm. Xiii.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

rehabilitasi sangat intensif digunakan pada Rezim Orde Baru Suharto yang bercorak militeristik. Setiap pelaksanaannya diawasi oleh militer agar keberlangsungannya sesuai dengan desain rezim. Moncongloe, sebagai tempat pengasingan menyandang predikat ―Kamp Instalasi Rehabilitasi (Inrehab)‖. Secara implisit, nama ini menyiratkan maknanya. Para tahanan politik di sana diharuskan bekerja, bukan sebatas untuk keperluan mereka sendiri, melainkan juga untuk kebutuhan penguasa dan militer.

Pengasingan atau pembuangan sudah dikenal sejak zaman kuno dalam sejarah umat manusia. Seperti kisah Pandawa yang kalah berjudi dan harus menanggung penghukuman, pembuangan selama 12 tahun di hutan Kamyaka dan menjalani penyamaran selama setahun terakhir masa pembuangan. Seperti Presiden Sukarno yang dengan piawainya mengkritik pemerintahan kolonial, sehingga diasingkan di Ende, Nusa Tenggara Timur selama empat tahun.[14] Pengasingan sebagai hukuman bisa dimaknai sebagai cara membunuh secara implisit.

Sebagai kelompok yang dimarjinalkan, para tapol yang dianggap anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah dikontrol ketat dan diasingkan oleh negara ke dalam kamp-kamp pengasingan di beberapa daerah di

---

Di pulau ini Bung Karno diasingkan dari rakyat, dari teman-teman gannya, dan dari keluarganya/ Bapak dan Ibunda tercinta, selama hampir n, yaitu sejak 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Selengkapnya lihat Ationy Agnes. Skripsi: *Pengasingan Soekarno di Ende Flores Tahun 1934* - ogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2016).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Indonesia.[15] Di Sulawesi Selatan, para Tapol PKI diasingkan di hutan Moncongloe, sebuah daerah yang tepat berada diantara dua kabupaten, Maros dan Gowa. Kamp pengasingan ini merupakan tempat pengisolasian Tapol PKI di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada umumnya para Tapol itu berasal dari anggota/simpatisan PKI, orang-orang yang diduga PKI dan ormas-ormasnya, seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI), Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Mereka terdiri dari latar belakang profesi yang heterogen, antara lain seperti, wartawan, pegawai negeri sipil, akademisi, politisi dan lain sebagainya.

Moncongloe—yang dulunya daerah hutan perbukitan bambu berduri dikelilingi tanaman ilalang—mulai dibuka oleh Kodam XIV Hasanuddin dalam hal ini Team Pemeriksa Daerah (Teperda) Sulawesi Selatan dan Tenggara sebagai kamp pengasingan Tahanan politik PKI pada 1969, pembukaan ini dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu; sebagai upaya untuk menanggulangi pembiayaan penanganan tahanan politik PKI yang sangat terbatas,[16] jumlah tahanan politik PKI yang semakin bertambah drastis sedangkan kapasitas sel terbatas yang kemudian menjadikan penjara Makassar penuh sesak, berikut upaya mengamputasi ideologi komunis

---

[15] Tempat-tempat pengasingan Tapol PKI diantaranya adalah Pulau Nusakambangan, Pulau Buru, Plantungan, Pulau Kemarau-Palembang (Sumatera Sel[illegible] Argosari (Kalimantan Timur), Nanga-Nanga, Kendari (Sulawesi Tenggara), [illegible]gloe (Sulawesi Selatan) Wadas Lintang, Brebes dan Plantungan (Jawa [illegible] LP Pekambingan (Bali).

[illegible]Ahmad, Taufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe*. Depok: Desantara, 2009 [illegible].

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tahanan politik PKI dari masyarakat sesuai petunjuk Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (PangKopkamtib)[17]. Awalnya proyek pembukaan kamp ini disama artikan sebagai transmigrasi lokal Tapol yang karib disebut Kamp Pengasingan (Kampsing) kemudian diubah menjadi Kamp Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Moncongloe. Kamp Pengasingan Tapol di Moncongloe tidak hanya menjadi sebagai tempat pemanfaatan (tefaat), melampaui itu, berkembang menjadi arena eksploitasi tenaga Tapol untuk kepentingan pribadi petugas dan institusi militer. Pada bulan Maret 1969, sebanyak sebelas Tapol didatangkan ke Moncongloe,[18] dengan tujuan membangun barak sementara untuk menampung para tahanan yang akan didatangkan pada periode berikutnya. Tepat di Bulan Juli 1969 barak sementara dapat diselesaikan dengan ukuran 4 x 18 meter. Dengan selesainya barak sementara, maka didatangkanlah tahanan dari penjara Makassar sebanyak 44 orang. Kedatangan gelombang dua ini dimaksudkan untuk dieksploitasi tenaganya guna membangun Kamp Pengasingan (Kampsing) yang sesungguhnya. Alhasil, di akhir 1969, kamp selesai dibangun, dimulailah kehidupan baru Tapol dalam sebuah

[17] Lihat keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. KEP-007/KOPKAM/2/1969 Tentang Organisasi Team Penjelesaian Tahanan/tawanan G 30 S/PKI Pusat dan Team Penjelesaian Tahanan/tawanan G 30 S/PKI Daerah. Silahkan lihat Arsip Kotamadya Ujung Pandang Reg 937.

[18] Sebelas Tapol itu terdiri dari tujuh laki-laki dan empat perempuan anggota mereka adalah Mujino (eks Direktur STM 1 Makassar), Ispoyo (Lekra), Sarmo (SBTI), Supeno (SBTI), Sahabuddin (CGMI), Anwar Rahim Arif (Pemuda Rakyat), Norman Intan, Suparti, Maryama Bado, dan Maryani. mad, Taufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe*. Depok: Desantara, 2009. .

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kamp Pengasingan. Kamp Pengasingan Moncongloe. Dengan jumlah Tapol mencapai 911 orang, berasal dari berbagai penjara di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Studi tentang Tahanan Politik (Tapol) PKI diberbagai tempat di Indonesia telah banyak dilakukan oleh sejarawan dan ilmuwan sosial lainnya, seperti John Rossa, Krisnadi, Ahmad Taufik, Pramoedya Ananta Toer dan Ben Anderson. John Rossa dalam karyanya *Dalih Pembunuhan Massal*, menjelaskan peristiwa 30 September 1965 beserta akibatnya dengan pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan dan pendukung PKI dan organisasi gerakan kiri. Penguasa Orde Baru selama ini menjelaskan pembunuhan massal sebagai ―eksesǁ karena masyarakat marah melihat pengkhianatan PKI. Seolah-olah reaksi terhadap PKI adalah sesuatu yang wajar/alamiah karena perilaku PKI sendiri. Dalih Pembunuhan Massal dengan cermat memisahkan antara apa yang kita ketahui telah terjadi berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan segala teori, tafsir dan juga fantasi mengenai peristiwa itu.[19] Pembunuhan massal dengan begitu bukan sebuah konsekuensi logis dari apa yang sesungguhnya terjadi, tapi reaksi langsung terhadap narasi yang disusun dengan piawai oleh penguasa Orde Baru.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Fantasi kerap dilekatkan dengan peristiwa 30 September 1965 beserta ı, lihat tulisan Hilmar Farid https://indoprogress.com/2008/04/g-30-s-dan-han-massal-1965-66/ (diakses pada 10 April 2022 Pukul 14.00).

Benedict Anderson menulis artikel di jurnal Indonesia yang diterbitkan Universitas Cornell dengan judul *"Bagaimana Para Jenderal itu Gugur?"*[20] berdasarkan *visum et repertum* yang dibuat oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Soeharto. Visum itu bertolak belakang dengan berita-berita yang dimuat dalam harian *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*—yang dikelola oleh Angkatan Darat–bahwa para jenderal yang diculik pada dini hari 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan keji seperti pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin. Visum itu jelas memperlihatkan bahwa tidak ada mata yang dicungkil dan semua kemaluan utuh pada tempatnya.

Taufik Ahmad dalam karyanya *Kamp Pengasingan Moncongloe*, menjelaskan ragam analisis yang ketat terkait kemunculan dan perkembangan PKI di Sulawesi Selatan dan peristiwa yang terjadi setelah penangkapan dan pengasingan para anggota/simpatisan PKI di Kamp Moncongloe, serta berbagai kisah traumatik yang diderita para Tapol sejak dalam kamp Moncongloe dan pasca pembebasannya. Ada semacam kontrol sosial yang dilekatkan kepada identitas tapol pasca pembebasannya, seperti dicap sebagai orang yang tidak bersih lingkungan.

Pramoedya Ananta Toer dalam karyanya *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu I; Catatan dari Pulau Buru*, menjelaskan berbagai pengalaman Tapol yang diasingkan di Pulau Buru. Menurut Pramoedya, pengalaman merupakan hak pribadi yang tidak

---

Diterjemahkan dari versi asli *—how did the generals die?*‖, Benedict .

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dapat dirampas. Di samping itu, Pramoedya juga mengisahkan tentang kondisi geografis dan keganasan iklim sekitar Pulau Buru. Tak hanya Pramoedya, Krisnadi pun dalam karyanya Tahanan Politik Pulau Buru 1969 – 1979 menjelaskan latar belakang penangkapan dan pengasingan para Tapol ke Pulau Buru, Di sini keseharian Tapol dinarasikan dengan sangat sederhana oleh Krisnadi, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh siapapun yang memiliki perhatian terhadap sejarah Tahanan Politik di Pulau Buru.

Penangkapan, penahanan dan pengasingan Tapol ke dalam Kamp Moncongloe adalah bagian mosaik sejarah yang masih minim ditemukan dalam jejak historiografi Sulawesi Selatan. Keberadaannya adalah akibat dari penumpasan PKI dan upaya orde baru dalam membangun hegemoninya melalui pendisiplinan Tapol dalam kamp pengasingan. Kisah tapol Moncongloe adalah kepingan mosaik sejarah yang dapat menjadi acuan Sejarah Indonesia kontemporer. Jika mosaik ini tidak diungkap lengkap maka ruang hampa dalam sejarah Indonesia akan semakin menunjukkan titik kesunyian. Selama ini informasi mengenai penanganan dan penangkapan Tapol di Sulawesi Selatan hanya berupa artikel di media cetak dalam jumlah yang sangat terbatas.[21] Tesis Taufik Ahmad, ―Komunitas tapol PKI di Sulawesi Selatan: Kontrol Negara yang Berlapis yang kemudian diterbitkan dengan judul *Kamp Pengasingan Moncongloe*, secara komprhensif menjelaskan awal, dalam [illegible] para Tapol diasingkan dalam Kamp Moncongloe, namun sangat minim

[illegible]aufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe. Op cit.* Hlm. 97

Optimized using
trial version
www.balesio.com

membahas politik sehari-hari (*Daily Politics*) tapol dalam kamp pengasingan. Padahal, kehidupan tapol dalam pengasingan sangatlah kompleks dalam hal merespon kontrol militer. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memotret politik sehari-hari Tapol dalam Kamp Pengasingan Moncongloe.

Victor Frangki dalam bukunya, *Man's Search for Meaning*, mengenang pengalaman indrawinya ketika di dalam kamp konsentrasi Nazi mengatakan —*There were always choices to make. Every day, every hour offered the opportunity to make a decision, a decision which determined whether you would or would not submit to those powers which threatened to rob you of your very self, your inner freedom; which determined whether or not you would become the plaything of circumstance, renouncing freedom and dignity to become moulded into the form of the typical inmate".*[22]

Kutipan pengalaman Victor Frangki dalam kamp Nazi di atas pada dasarnya memperlihatkan sebuah politik sehari-hari dalam kamp tahanan. Setiap hari, setiap jam selalu manawarkan untuk menentukan keputusan, apakah akan tunduk pada ancaman selama dalam kamp, atau memilih kebebasan batin dan membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan perlawan diam-diam atau terselubung. Dalam konteks studi ini, politik sehari-hari dan perlawanan sehari-hari berupaya untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman tapol dalam kamp pengasingan Moncongloe.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Victor E. Frankl. *Man's search for meaning: revised and updated* (New Washinton Square Press, 1985). Hlm. 86-87.

Tidak hanya menyangkut keadaan yang memprihatinkan tetapi juga interaksi sehari-hari, keputusan, pilihan-pilihan tindakan tapol yang bertujuan bertahan dan melawan kebijakan kamp dengan cara mereka sendiri.

Lasswell mendefinisikan politik sehari-hari dalam pengertian luas, yaitu; siapa dapat apa dan bagaimana mendapatkannya.[23] Definisi ini juga digunakan oleh Erwiza Erman dalam Melihat politik becak di Jakarta.[24] Kerkvliet, dalam studinya politik petani di Vietnam, definisi politik sehari-hari diperluas menyangkut kontrol dan penggunaan sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta makna-makna dibalik tindakan.[25] kemudian menurut Hobson dan Seabrooke bahwa subjek dari politik sehari-hari lebih tertarik pada ekspresi dan tindakan yang terselubung, diam dan tampak memanipulasi ketenangan.[26] berdasarkan definisi ini, maka pada dasarnya tidak ada yang bisa lepas dari politik sehari-hari.

Kerkvliet membagi topik besar politik sehari-hari menjadi lima kategori: dukungan sistem, kepatuhan dalam sistem, modifikasi sistem, penghindaran dari sistem secara tidak sengaja, dan perlawanan langsung. Kervliet menemukan bahwa segala macam petani dan orang-orang biasa di Thailand tengah secara teratur

---

[23] H Lasswell. *Who gets What, When, How*. (Cleveland: World Publishers, 1958).

[24] Erman, Erwiza, "Kehidupan dan Politik Penarik Becak di Jakarta (1930-1960)," in Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa, ed. Erwiza Erman and Ratna Saptari (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013).

3enedict J. Kerkvliet. *The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Transformed National Policy* (Ithaca NY: Cornell University Press, 2018).

. Hobson and L Seabrooke. *Everyday Politics of the World Economy* (New mbridge University Press, 2009).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

membahas pejabat, kebijakan, dan proyek negara saat ini, sehingga menunjukkan kepatuhan atau dukungan terhadap sistem mereka. Modifikasi dan penghindaran sistem termasuk 'mengambil jalan pintas' atau mengabaikan aturan resmi.[27] Dalam perspektif Scott, politik sehari-hari lebih didefinisikan sebagai perlawanan sehari-hari dari kaum lemah atau tertindas atas kaum penguasa. Dalam perlawanan sehari-hari dimaknai sebagai senjata bagi orang lemah. Mereka melakukan perlawanan dengan bermalas-malasan, melanggar aturan-aturan resmi secara diam-diam.[28]

Berdasarkan definisi di atas, studi ini berupaya melihat politik sehari-hari tapol di kamp pengasingan Moncongloe dengan meletakkan aktivitas sehari-hari tapol, bekerja di perkebunan petugas kamp, berkebun, bermalas-malasan dalam bekerja di kebun petugas dan membangun solidaritas serta berbagai sindiran-sindiran dalam kode-kode bahasa dalam berkomunikasi antara mereka. Beragam tindakan ini dapat dapat dikategorikan sebagai politik sehari-hari tapol dalam kamp pengasingan Moncongloe.

Politik sehari-hari tapol yang menjadi fokus penelitian ini adalah politik dalam pengertian non-formal. Politik sehari-hari dalam pengertian non-formal ini dibangun dari pertanyaan dasar ―siapa yang mendapatkan apa dan bagaimana caranya (*who gets what and how*). Penelitian ini akan menganalisis dinamika *daily politics*

---

[27] Benedict Kerkvliet, "*Everyday Politics in Peasant Societies (and Ours)*" The Journal of Peasant Studies 36 (2009). Benedict Kerkvliet, The Power of Everyday : *How Vietnamese Peasants Transformed National Policy* (Ithaca NY: University Press, 2018).

James C. Scott. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant e* (Connecticu: Yale University, 1985).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tahanan politik dalam usaha bertahan hidup di tengah kontrol militer selama dalam Kamp Pengasingan Moncongloe, seperti, istirahat di tengah perjalanan ke kebun petugas sebagai wujud mengulur waktu,[29] menghindari kerja wajib, menghindari hukuman, mengakali petugas, mendapatkan makanan, membangun solidaritas antar-Tapol, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **—*Daily Politics* Tahanan Politik di Kamp Pengasingan Moncongloe (1969–1977)"**

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana politik sehari-hari tahanan politik (Tapol) PKI dalam menghadapi tekanan dan kontrol militer di kamp pengasingan Moncongloe, Sulawesi Selatan? Pokok permasalahan ini diturunkan ke sub-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aktivitas *Daily Politics* itu?
2. Mengapa Tahanan Politik melakukan aktivitas *Daily Politics*?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian sejarah perlu dibatasi sesuai dengan topik yang diteliti. Ruang lingkup kajian berguna untuk membantu peneliti agar pembahasannya tetap memiliki titik fokus dan tidak terjerumus dalam pembahasan yang terlampau lebar dan luas. Adapun ruang lingkup dalam kajian dan penelitian ini mencakup beberapa aspek

[29] Wawancara dengan Pasrah di Pare-Pare, 15 September 2022.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini mencakup wilayah provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di kamp Pengasingan Moncongloe. Beberapa studi yang telah dilakukan mengenai hal seputar tragedi 1965 telah ada yang fokus membahas kontrol pemerintah terhadap tapol di daerah ini. Namun belum ada yang membahas secara komprehensif mengenai politik sehari-hari para tapol selama dalam kamp pengasingan Moncongloe. Studi tentang politik sehari-hari para tapol selama dalam kamp Pengasingan Moncongloe (1969-1977). PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan komunisme juga dilarang untuk berkembang, kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Ketika terjadi penghancuran terhadap PKI, di kamp pengasingan ini terdapat 911 orang yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.[30] Selain itu, jumlah itu menjadi menarik mengingat Sulawesi Selatan setelah sekian lama merupakan basis bagi organisasi DI/TII dan Permesta.

Sedangkan lingkup temporal dalam penelitian ini mencakup periode dari tahun 1969 sampai 1977. Tahun 1969 dipilih sebagai periode didatangkannya para tapol berbagai daerah di Sulawesi Selatan mulai menghuni kamp pengasingan Moncongloe. Tahun 1977 dipilih sebagai batas penelitian ini adalah karena di tahun itu merupakan pembebasan massal terhadap para tapol yang berada di Moncongloe.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

'aufik, *Kamp Pengasingan Moncongloe. Op cit*, Hlm. 152.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan sejarah terbentuknya Kamp Pengasingan Tapol di Moncongloe (1969 – 1977)
2. Menjelaskan kebijakan yang dilakoni negara terhadap para Tapol di Kamp Pengasingan Moncongloe
3. Menjelaskan apa yang menjadi landasan Tapol dalam melakukan aktivitas politik sehari-hari di Kamp Pengasingan Moncongloe

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada publik bahwa negara era orde baru pernah mengeksploitasi para Tapol dalam Kamp Pengasingan Moncongloe (1969 – 1977).
2. Menambah khazanah pengetahuan terkait politik sehari-hari Tapol dalam Kamp Pengasingan Moncongloe (1969 – 1977).

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Gerakan 30 September, kekerasan 1965-1966 dan sesudahnya telah banyak dilakukan, baik itu oleh peneliti asing maupun peneliti domestik Indonesia. Dengan mendiskusikan beberapa karya tersebut, maka diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai perbedaan dari karya-karya tersebut dengan fokus penelitian ini.

aufik Ahmad dalam buku ―Kamp Pengasingan Moncongloe‖ mengungkap ıa proses pelabelan dari orde baru terhadap mereka yang diduga PKI,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bagaimana keseharian mereka di penjara, kontrol ketat dari agen-agen represif negara, lalu berpindah ke Kamp Pengasingan Moncongloe, suatu kamp yang dikontrol ketat oleh militer dan merupakan tempat pemanfaatan (tefaat) bagi para Tapol. Moncongloe adalah daerah khusus yang terletak di Sulawesi Selatan, sekitar 20 KM dari ibukota Kabupaten Gowa dan 15 KM dari ibukota Kabupaten Maros, daerah ini memiliki ketinggian sekitar 250 meter dari permukaan laut dengan struktur tanah yang bergelombang. Pada awal penahanan, para Tapol ditawan di Kodim daerah masing-masing kemudian di bawa ke Lapas daerah masing-masing. Tapol yang ditempatkan di penjara Komando Distrik Militer (Kodim) 1408 Makassar, umumnya berasal dari kota Makassar dan sekitarnya. Kondisi Tapol dalam penjara semakin hari semakin memburuk, banyaknya Tapol yang meninggal, adanya resistensi Tapol seperti mogok makan dan mencuri makanan di dapur petugas, serta persediaan dana negara terhadap Tapol menipis menjadi pertimbangan perlunya tempat pemanfaatan (tefaat) Tapol di lokasi tertentu yang mudah dikontrol militer. Moncongloe dipilih karena dianggap aman dan dekat dari markas militer Kodam XIV Hasanuddin, sehingga para Tapol di Kamp Moncongloe dapat dikontrol dengan mudah. Setelah Tapol keluar dari kamp pengasingan dan hidup ditengah masyarakat, kontrol militer beralih ke kontrol sosial, ini ditandai dengan pandangan negatif negara terhadap para tapol dengan cap ―tidak bersih lingkungan‖.

uku ini juga membahas kengerian militer terhadap para tapol sejak
n yang tidak jelas dan eksploitasi tenaga tapol semasa berada dalam Kamp
gan Moncongloe. Di samping itu, buku ini juga membahas sejarah tumbuh

dan berkembangnya PKI di Sulawesi Selatan, peristiwa G30S dan kejadian setelahnya.

Tentu dalam eksploitasi tenaga tapol tersebut menuai respon yang jamak, salah satunya adalah resistensi tapol. Membahas politik sehari-hari terselubung, penulis sengaja merujuk pada James C. Scott dalam buku ―Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah‖. Dalam buku ini digambarkan tentang pola politik terselubung keseharian petani di Malaysia terhadap tuan tanah. Meskipun buku ini menceritakan latar belakang politik sehari-hari yang berlangsung di Malaysia, itu tidak berarti bahwa apa yang terkandung dalam buku ini tidak relevan dalam konteks Indonesia. Di samping itu, buku ini juga menjelaskan bagaimana negara dan aparaturnya (minoritas) berlaku tidak adil terhadap masyarakatnya (mayoritas), inilah yang menjadi pemicu aktivitas politik sehari-hari terselubung para petani. Dan menurut penulis politik sehari-hari seperti itulah yang terjadi dalam Kamp Pengasingan Moncongloe.

Asvi Warman Adam dalam buku ―Melawan Lupa, Menepis Stigma Setelah Prahara 1965‖ menulis tentang bagaimana negara menerapkan dominasi dan hegemoni terhadap Gerakan 30 September. Dalam buku ini Asvi menjelaskan bagaimana pengalaman para korban Gerakan 30 September, dimulai dari penangkapan, penahanan, perburuan, pembunuhan massal, pembuangan paksa i), hingga perlakuan diskriminatif dialami jutaan keluarga korban 1965 cap tidak bersih lingkungan (hegemoni). Stigma sangat buruk kepada korban ırganya yang mengakibatkan trauma dan penderitaan berkepanjangan harus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

segera ditepis agar tidak melekat sepanjang hayat. Dalam hal ini, negara menerapkan dominasi dan hegemoninya terhadap para korban.

Untuk melihat bagaimana hegemoni itu berdampak kepada masyarakat, John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid dalam buku ―Tahun yang tak pernah Berakhir‖ adalah hasil mewawancarai beberapa narasumber dari ekstapol dan keluarga mereka untuk mengumpulkan cerita-cerita biografi kolektif dari orang yang memiliki pengalaman serupa dalam perjalanan hidupnya (masa pra-1965, penangkapan, interogasi, penahanan, pembebasan, dan kehidupan di luar penjara). Metode penelitian dalam buku ini adalah sejarah lisan. Artinya narasi buku ini dibangun atas wawancara terhadap para korban. Hasil dari penelitian dalam buku ini adalah kebanyakan korban ingin menentang ingatan sosial yang menganggap mereka sebagai setan dan penghianat. Para narasumber menolak hegemoni negara, dalam hal ini adalah narasi yang menyebutkan mereka sebagai pemberontak dan penghianat.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai tapol dalam skala nasional ataupun di daerah telah mulai dilakukan oleh para penulis ataupun akademisi. Namun, masih sedikit yang mengkaji mengenai tema itu dalam konteks Sulawesi Selatan. Satu-satunya peneliti sekaligus akademisi yang mengkaji tapol di Sulawesi Selatan adalah Taufik seorang. Maka, penelitian ini berusaha untuk melengkapi kajian-kajian yang sudah ada dan memberikan an berarti bagi penulisan sejarah tentang tahanan politik di Indonesia, a di Kamp Pengasingan Moncongloe.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.7 Kerangka Teoritis

Indonesia di bawah kekuasaan Suharto—adalah fokus penelitian ini—menerapkan dua instrumen negara untuk membasmi PKI,[31] bahkan orang-orang yang diduga PKI. Melalui Kopkamtib, Suharto menangkap tanpa mengadili dan mendisiplinkan orang-orang yang di-―PKI‖-kan. Pendisiplinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat terhadap mereka yang diduga terlibat Gerakan 30 September beserta keluarganya dengan membimbing ke arah jalan yang ―benar menurut orde baru‖ dengan tujuan untuk menyadarkan mereka agar secara sadar meninggalkan dan menanggalkan ideologi komunis menjadi insan Pancasilais.[32]

Dalam merespon penahanan itu, para tapol tentu tidak pasrah-pasrah saja, apalagi para tahanan politik yang berhasil di ―PKI‖-kan. Beberapa tapol merespon penangkapan ini dengan resistensi terselubung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori James C. Scott mengenai pola resistensi terselubung.

Melalui reformasi yang merupakan tanda runtuhnya rezim orde baru, penulisan sejarah terhadap orang-orang yang dimarjinalkan bahkan distigmatisasi oleh orde baru seperti tapol, mendapat ruang untuk dituliskan dengan menentang sejumlah asumsi dan kebenaran yang selama 32 tahun dikontrol oleh negara. Sejarah,

---

[31] Althusser, Louis. 2015. Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi). Diterjemahkan oleh Mohamad Zaki Hussein dari judul asli *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)*. rta: IndoPROGRESS. Hlm. 3.

Direktorat Jendral Sosial Politik, Pedoman Teknis tentang Pelaksanaan ın dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI. 4 September 1982. Hlm. 9.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan kata lain, di era reformasi ini menjadi lebih demokratik. Dengan demikian, untuk memudahkan penulis dalam memahami sejauh mana pola resistensi yang telah dibangun tahanan politik di Kamp Pengasingan Moncongloe, terkhusus pada mereka yang dicap PKI, maka perlu digambarkan dalam kerangka pemikiran, yang menghubungkan antara gambaran objektif yang terjadi di lapangan dan kaitanya dengan teori yang digunakan sebagai berikut:

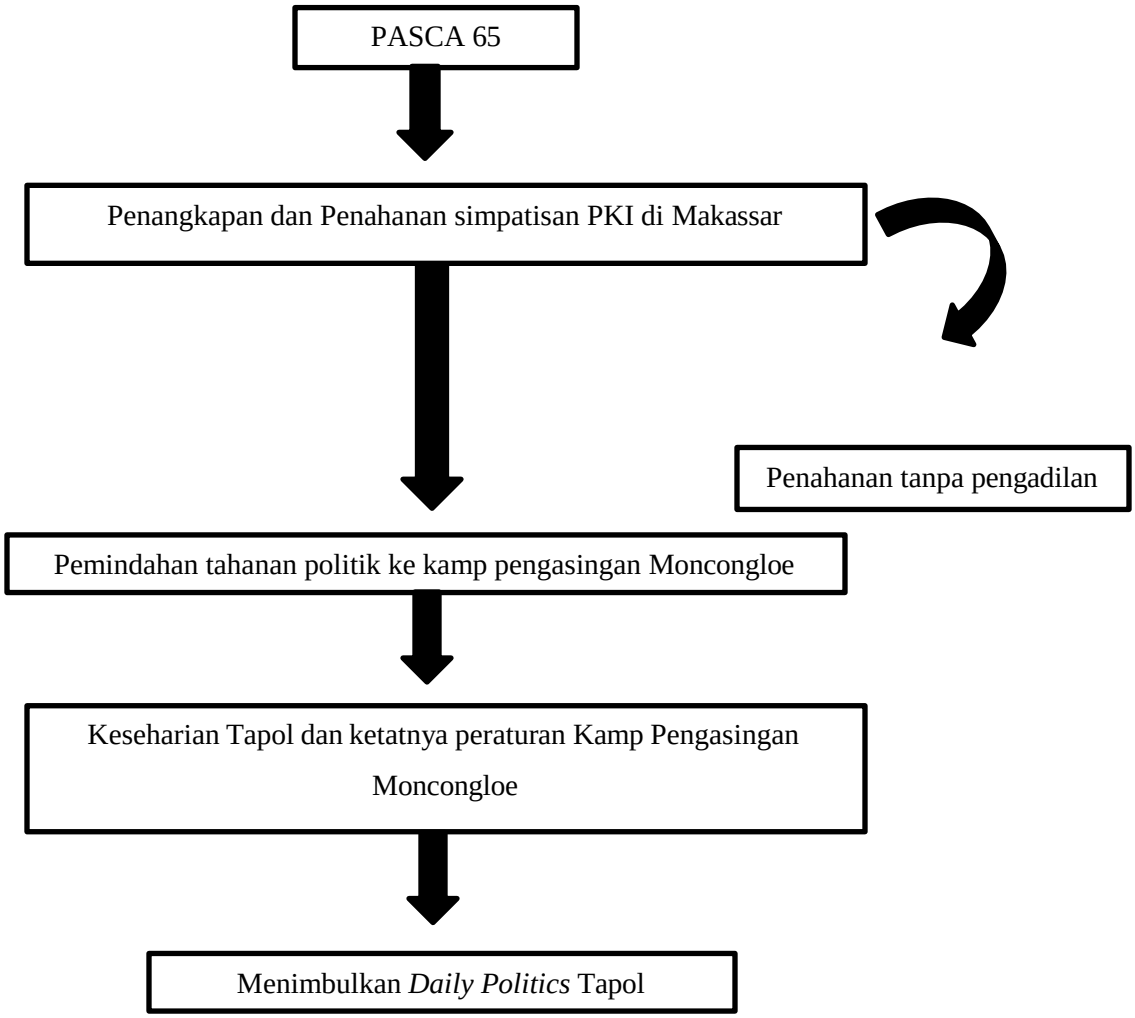

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yakni seperangkat aturan dalam usaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menganalisis secara kritis dan kemudian menyajikannya dalam tulisan sejarah. metode penelitian ini bertumpu pada lima langkah pokok, yaitu:

1. **Pemilihan Topik**

   Selama ini informasi mengenai penanganan dan penangkapan Tapol di Sulawesi Selatan hanya berupa artikel di media cetak dalam jumlah yang sangat terbatas. Tesis Taufik Ahmad, ―Komunitas tapol PKI di Sulawesi Seltan: Kontrol Negara yang Berlapis yang kemudian diterbitkan dengan judul Kamp Pengasingan Moncongloe, secara komprhensif menjelaskan awal, dalam dan akhir para Tapol diasingkan dalam Kamp Moncongloe, namun sangat minim membahas politik sehari-hari (*daily politics*) tapol dalam kamp pengasingan. Padahal, kehidupan tapol dalam pengasingan sangat kompleks dalam merespon kontrol militer. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memotret politik sehari-hari Tapol dalam Kamp Pengasingan Moncongloe, seperti menghindari kerja wajib, menghindari hukuman, mengakali petugas, mendapatkan makanan, membangun solidaritas antar-Tapol, dan lain sebagainya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data penelitian, materi sejarah atau evidensi sejarah.[33] Data berupa arsip yang dikumpulkan berhubungan dengan politik Orde Baru terhadap mantan kaum komunis di Sulawesi Selatan. Sumber-sumber sejarah tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan politik Orde Baru terhadap mantan kaum komunis di Sulawesi Selatan. Arsip-arsip tersebut penulis ditemukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulawesi Selatan. Arsip-arsip yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926 – 1988) dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan 1964 – 1974.

Selain sumber-sumber tertulis, dan untuk mengimbangi arsip-arsip pemerintah, maka akan diusahakan melakukan beberapa wawancara lisan. Untuk melengkapi sumber dari penelitian ini maka akan diusahakan untuk mencari sumber-sumber lisan berupa kesaksian penyintas sejarah 1965. Demi keperluan ini penulis menjalin komunikasi dengan para penyintas yang pernah mendekam di Kamp Pengasingan Moncongloe, penulis mengacu pada orang-orang yang telah diwawancarai oleh Taufik dan beberapa pendekatan lainnya. Ingatan-ingatan kolektif mengenai kehidupan para tapol semasa di kamp pengasingan Moncongloe itu akan berguna untuk merekonstruksi sejarah ―politik sehari-hari

---

Helius Sjamsudin. Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Ombak, 2007). Hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tapol dalam Kamp Pengasingan Moncongloe. Ingatan-ingatan itu bisa saja tersebar di berbagai orang-orang secara terpisah. Ketika itu terjadi, cara untuk melestarikan ingatan-ingatan itu adalah dengan menuliskannya, karena tulisan akan tetap hidup meskipun pemikiran dan kata-kata mati. Secara umum, kajian mengenai ingatan ini dianggap dapat mengubah kita dalam memandang waktu dan interelasi atas masa lalu, masa kini dan masa depan.

Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang memberikan keterangan yang sifatnya mendukung data sumber. Sumber-sumber ini bisa berupa buku-buku teks, dan artikel ilmiah yang mengandung informasi mengenai politik Orde Baru terhadap komunisme, juga terhadap para tapol PKI. Karya-karya itu didapatkan dengan studi pustaka dilakukan di beberapa pustaka seperti Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Laboratorium Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Ruang Baca Pascasarjana Universitas Hasanuddin, serta Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah mendapatkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah tahap kritik (pengujian) sumber. Kritik dibagi dua, pertama kritik ekstern yang digunakan untuk mengetahui keaslian sebuah sumber. Untuk memastikan bahwa sumber itu

umber yang digunakan harus merupakan sumber yang dikehendaki, sumber

asli atau tidak turunan dan harus utuh. Kedua, kritik intern, yang

natikan dalam tahapan ini adalah kredibilitas atau kebenaran sumber.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Caranya adalah sumber yang telah didapatkan kemudian dibandingkan dengan sumber yang lain sehingga diharapkan didapatkan sumber yang dapat dipercaya.

4. Interpretasi (Penafsiran)

Peneliti menghimpun informasi suatu periode sejarah yang diteliti dengan menelaah setiap sumber-sumber yang telah didapatkan. Berdasarkan keterangan itu dapat disusun fakta-fakta sejarah. Kemudian fakta itu diseleksi, dianalisis dan disintesiskan dalam urutan kronologi dan dalam konteks hubungan kausalitas. Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui kritik sumber dengan mencari dan menyusun hubungan antar fakta-fakta yang relevan, kemudian disusun secara kronologis dalam hubungan kausalitas yang dianalisis menggunakan konsep-konsep ilmu sosial dan sejarah.

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan suatu kegiatan penulisan hasil penelitian sejarah secara deskriptif-analitis, berdasarkan sistematika dan kronologis. Ini adalah tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah, dimana sumber-sumber yang telah dikumpulkan, diseleksi dipahami lalu dituangkan dalam bentuk tulisan yang ilmiah. Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan merupakan suatu cara yang utama untuk memahami sejarah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tulisan ini, penulis perlu membahas mengenai isi dari apa yang ditulis. Adapun pembahasan terkait adalah sebagai berikut:

Bab 1 akan dijelaskan mengenai latar belakang mengapa peneliti mengangkat judul dalam pembuatan skripsi. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan tentang batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematikan penulisan.

Bab 2 Mengulas alur penangkapan Tapol PKI di Sulawesi Selatan

Bab 3 Membahas Kamp Moncongloe, mulai dari perintisan, dasar perintisan dan dinamika eksploitasi militer yang dibungkus dalam kata kebijakan

Bab 4 Mengulas tentang bagaimana rutinitas tahanan politik PKI dalam Kamp Pengasingan Moncongloe.

Bab 5 Membahas kesimpulan dan saran.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

ALUR PENANGKAPAN TAPOL PKI DI SULAWESI SELATAN

Dalam waktu singkat setelah penculikan dan pembunuhan enam jenderal tertinggi Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965, pimpinan Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto memulai upaya untuk menghancurkan Gerakan tersebut beserta PKI dan organisasi yang terafiliasi. Tindakan ini dilakukan dengan metode mencari dukungan dari para pimpinan partai politik yang sangat anti-komunis, seperti NU, PNI, IPKI, Partai Katolik dan organisasi massa mereka, serta berbagai pasukan milisi sipil, kelompok preman dan mahasiswa untuk melakukan kekerasan terhadap gerakan komunis di tanah air.[1]

Menurut John Rossa dalam pengetahuan tentang sebuah rahasia umum: Penghilangan Massal 1965-66 di Indonesia, para ahli maupun pengamat sejarah sering menggunakan tesis dualistik karya Christian Gerlach.[2] Christian Gerlach adalah seorang peneliti berkebangsaan Jerman, dalam bukunya yang berjudul *Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World*, menyajikan bahwa kerap muncul perspektif ―tesis dualistik‖ terhadap alur

[1] Geoffrey Robinson. ―Sampai ke Akar-akarnya‖: Peran Angkatan Darat Indonesia dalam Pembantaian Massal tahun 1965-66. Lihat di 1965 Pada Masa Kini: Hidup Dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal. Yogyakarta: Pusdema, 2019, Hlm. 39.

[2] John Rossa mengutip tesis dualistik Christian Gerlach ini dalam alur ...gan massal 1965-66 di Indonesia. Selengkapnya lihat ...vw.tribunal1965.org/pengetahuan-tentang-sebuah-rahasia-umum-...gan-massal-1965-66-di-indonesia/ (diakses pada 8 Februari 2024 pukul

Optimized using trial version www.balesio.com

penangkapan dan kekerasan massal pasca G30S. Perspektif pertama adalah "horizontal" yang dipegang oleh kelompok sayap kanan cenderung menekankan peran masyarakat dalam kejadian tersebut. Perspektif ini percaya bahwa masyarakat, yang merasa marah dan ingin membalas dendam terhadap PKI atas apa yang dianggap sebagai pengkhianatan dalam upaya kudeta, mayoritas pendukung perspektif ini adalah militer Angkatan Darat. Di sisi lain, perspektif "vertikal" yang digunakan oleh kelompok kiri-liberal cenderung menyoroti manipulasi[3] yang dilakukan oleh militer Angkatan Darat terhadap masyarakat (Gerlach 2010, 30-31).[4] Konteks manipulasi di sini bergantung pada kapasitas Komandan Angkatan Darat di tiap daerah dalam menghasut dan memobilisasi ketegangan massa tersebut dengan suatu seruan untuk menghancurkan gerakan komunis. Kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut bergantung pada beberapa faktor, antara lain kerelaan pemimpin politik dan pemuka agama untuk

[3] Manipulasi ini meliputi bahasa yang disebarkan secara cepat ke seluruh tanah air, sebagian melalui televisi dan surat kabar yang dikontrol oleh Angkatan Darat, seperti Koran *Harian Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*, serta tak terhitung banyaknya pawai massa, demonstrasi, upacara, deklarasi, khotbah dan pertemuan-pertemuan langsung. Dalam atmosfir histeria antikomunisme tersebut, konflik politik, agama dan budaya dan tanah yang sudah ada sebelumnya menjadi sangat mudah disulut api kemarahan.

[4] Christian Gerlach menulis gsebuah analasis bernas dengan penuh catatan kaki, ia berpendapat bahwa peran tentara sangat dibutuhkan tetapi terbatas. Ia menekankan ―ciri partisipatoris‖ yang ada pada keberlangsungan kekerasan pasca G30S, sambil menyebut Aceh, Jawa Timur dan Bali sebagai daerah yang warga sipilnya yang anti-komunis maju sendiri membasmi warga sipil yang komunis. yang utama adalah bahwa kekerasan itu sebagian besar timbul dari yang ada di dalam masyarakat Indonesia, dan bukan sesuatu yang an dari atas oleh tentara. Lihat: Christian Gerlach, *Extremely Violent Mass Violence in the Twentieth-Century World* (Cambridge: Cambridge y Press, 2010).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berkoalisi dengan mereka dan keberhasilan mereka dalam memobilisasi kelompok preman anti-komunis.[5]

Pagi hari, 4 Oktober 1965 di Jakarta, sebelum penggalian mayat para jendral, wujud awal dari koalisi ini merealitas melalui pembentukan sebuah payung organisasi massa militan anti-komunis yang dikenal sebagai Komando Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh (KAP-Gestapu).[6] Organisasi massa ini tersusun dari anggota yang berafiliasi dengan NU, IPKI, dan Partai Katolik. Meskipun seolah-olah berperan sebagai entitas sipil independen, KAP-Gestapu sebenarnya didirikan atas inisiatif dari pimpinan Angkatan Darat. Seiring pembentukan KAP-Gestapu, berbagai badan koordinasi dan "front aksi" lainnya juga dibentuk, masing-masing dengan dukungan dari otoritas Angkatan Darat. Namun, kelompok yang lebih signifikan dalam memperparah kekerasan berikut pembantaian massal adalah laskar anti-komunis yang diorganisir setelah 1 Oktober. Sebagian besar dari kelompok-kelompok ini memiliki afiliasi langsung dengan partai politik, seperti Banser dan Ansor dari NU, Pemuda Marhaen dari PNI, dan Pemuda Pancasila dari IPKI. Sementara unit-unit lain seperti Hansip dan Hanra merupakan bagian dari struktur administratif sipil negara yang sudah ada.[7] Koalisi ini bertugas untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan massal di tanah

[5] Geoffrey. *Sampai ke Akar-akarnya*. *Op cit*. Hlm. 32.

[6] Pada 2 Oktober 1965, Sutjipto mengadakan rapat dengan para pemimpin sipil di kantornya, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta dalam rangka memprakarsai Gestapu dan memaparkan situasi politik yang mulai memanas. OG, Roeder, *Soeharto: Biografi Presiden Soeharto*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1990. Hlm.

Geoffrey. *Sampai ke Akar-akarnya*. *Op cit*, Hlm. 40

Optimized using
trial version
www.balesio.com

air dengan dalih mengamankan ketertiban negeri, serta mendesak agar pers yang mendukung komunis dibreidel.[8]

KAP-Gestapu juga dibentuk di Makassar. Koalisi milisi anti-komunis ini berangsur-angsur semakin menguat setelah bergabungnya beberapa kesatuan lainnya, seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dipimpin oleh Rafiuddin Hamarung dan Jusuf Kalla, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) yang dipimpin oleh Erfan Yahya dan Bob Husein, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang dipimpin oleh Dr. Syamsi Lili dan Drs. Ek Halide, KASPI yang dipimpin oleh B. A. De Rosari dan Mappiase, Kesatuan Aksi Seniman Budayawan Indonesia (KASBI) yang dipimpin oleh Husni Jamaluddin dan Jamaluddin Latief, Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) yang dipimpin oleh A. F. Alhabsyi dan M. Jusuf Yunus, Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia (KAPNI) yang dipimpin oleh A. Rasid Ali dan A. Hafi, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI) yang dipimpin oleh Rosmiani dan Harsoyo, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) yang dipimpin oleh I. M. Amir Sj dan Haneng, Kesatuan Aksi Tani Indonesia (KATI) yang dipimpin oleh Hasanuddin Mahdis dan Sjamsir Djabar dan Kesatuan Aksi Perusahaan Pers Republik Indonesia (KPPRI) yang dipimpin oleh A. Muin M. G dan Ibrahim Boamabat.[9]

---

[8] Krisnadi, I.G, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* Jakarta: LP3S, 2001 Hlm. 57. Seperti Harian Marhaen di Makassar yang terbit sejak Februari 1953 mulai dilarang terbit oleh mulai 28 Oktober 1965 karena dianggap i dengan PKI. Lihat Arifin Anwar, *Pers dan Dinamika Politik*, Jakarta: atampone, 2010 Hlm. 211.

aha, Zainuddin. *Sulawesi Selatan, Dari A. Achmad Rifai ke Achmad 50-1970*, Makassar. Badan Penerbit UNM, 2017. Hlm. 75.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sore hari, 4 Oktober 1965, mayat enam Jendral dan seorang ajudan Nasution ditemukan di dalam sebuah sumur yang terletak di Dusun Lubang Buaya, di dekat Pangkalan Udara Republik Indonesia, di mana pada waktu itu menjadi tempat sukarelawan-sukarelawati Pemuda Rakyat dengan dibantu sejumlah Anggota Gerwani menjalani latihan dalam rangka aksi ganyang Malaysia yang sedang menggelora. Publikasi soal perlakuan biadab terhadap para jendral yang dibunuh ditampilkan media-media massa Angkatan Darat dengan sangat gencar, membangkitkan kebakaran nasional. Di bawah kendali cekatan militer dalam strategi perang urat syaraf, radio dan koran menggambarkan PKI sebagai partai yang telah lama merencanakan pengkhianatan yang dicirikan bersikap barbar.[10] Narasi ini menempatkan seluruh gerakan komunis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan para jenderal, yang menjadi awal dari upaya merebut kekuasaan. Media mengingatkan bahwa peristiwa ini sejalan dengan insiden Madiun pada tahun 1948, menunjukkan ketekunan PKI dalam upaya melemahkan kemerdekaan Indonesia.

Penggalian mayat jenderal dilakukan persis di hadapan beberapa kamera televisi, hal ini merupakan siasat politik. Peringatan ulang tahun ABRI pada tahun tersebut diadakan dengan cara yang tidak lazim, kali ini diperingati dengan duka mendalam saat pemakaman mayat para jenderal di Kalibata. Dalam upacara pemakaman, mayat diletakkan di atas tank. Pada kesempatan itu Soeharto

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Cossa John. *Dalih Pembunuhan Massal*. *Op cit*. Hlm. 27.

menegaskan pendirian Angkatan Darat dalam pidato singkatnya,[11] Publik diarahkan berpihak ke Angkatan Darat, dengan maksud mencegah mereka mempercayai Angkatan Udara, dan lebih jauh mempersalahkan Presiden Soekarno.

Berbagai wilayah di Indonesia mulai mengalami ketegangan politik akibat peristiwa ini. Di Aceh, kekerasan massal dimulai pada akhir minggu pertama Oktober dan dilanjutkan dengan penangkapan orang-orang Tionghoa, setelah Komando Militer Daerah Aceh menetapkan Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)[12] sebagai organisasi yang dituduh berafiliasi dengan PKI, karenanya harus dilenyapkan.[13] Pangdam Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa dan atasan langsungnya, Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta, sepakat untuk melawan Sukarno dan PKI, serta memiliki dukungan pasukan yang cukup setia. Mereka segera melaksanakan operasi untuk "menghilangkan" Gerakan 30 September dan PKI dengan sangat cepat dan efisien. Oleh karena itu, bertentangan dengan pandangan umum bahwa kekerasan di Aceh merupakan jenis "tugas suci" AD bersama koalisinya yang dipicu oleh kemarahan kaum Muslim yang taat, bukti yang ada sekarang menunjukkan bahwa pembantaian sebenarnya merupakan bagian dari operasi militer yang

[11] Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia 1945 -1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES. 1982 Hlm. 376.

[12] Siauw, Tiong Djin. *Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan Baperki dalam ndonesia*. Jakarta: Hasta Mitra, 2000. Hlm. 22.

Melvin, Jess, "Why Not Genocide? Anti-Chinese Violence in Aceh, 6", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32 (3), 2013, Hlm. 63-

Optimized using trial version www.balesio.com

direncanakan dengan sengaja untuk menghancurkan PKI.[14] Pada 28 Oktober 1965, mayoritas kader PKI di Aceh sudah dihabisi. Alih-alih mempropagandakan ancaman nyata, berita militer tersebut lebih merupakan upaya yang disengaja untuk menyebarkan histeria dalam masyarakat dan mendorong munculnya kesan bahwa pembunuhan itu ditunggangi nuansa keagamaan.

Sementara itu, di Jawa Barat, Kodam di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Ibrahim Adjie juga memiliki pandangan yang anti-komunis dan pasukan yang cukup. Namun, di Jawa Barat, jumlah pembantaian relatif sedikit. Perbedaan utamanya terletak pada keputusan Jenderal Adjie untuk menolak strategi pembantaian dan lebih memilih program penangkapan massal. Meskipun dia sangat anti-komunis, Jenderal Adjie memiliki loyalitas pribadi kepada Sukarno dan, berbeda dengan sebagian besar rekan perwira, ia mematuhi peringatan Sukarno untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap PKI.[15] Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dia enggan untuk segera melibatkan penduduk dan milisi Muslim setelah berhasil mengatasi pemberontakan Darul Islam di provinsi tersebut.

Di Jawa Tengah, salah satu basis massa PKI di Indonesia, dua minggu pertama Oktober dicirikan oleh demonstrasi yang bergejolak, penangkapan, dan

[14] Kemarahan ini ditimbulkan oleh propaganda berita palsu AD terhadap masyarakat Aceh mengenai adanya penyerbuan Gerakan 30 September di Yogyakarta yang berhasil menewaskan putra putri Aceh di Jogja serta uslimin di Djawa. Lihat: Melvin Jess. *Berkas Genosida Indonesia a Pembunuhan Massal 1965-1966)*, Depok, Komunitas Bambu, 2022,

Geoffrey. *Sampai ke Akar-akarnya. Op cit*. Hlm. 33.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penghancuran gedung partai. Namun, pembunuhan baru dimulai setelah Soeharto mengirimkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin oleh salah satu pengikut setianya, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.[16] Di kota-kota dan desa-desa yang mereka sempat lewati, pasukan ini mendorong koalisi milisi lokal, untuk menangkap dan menyerahkan orang-orang yang disinyalir sebagai PKI.[17] Eksekusi umumnya dilakukan di hutan dan jenazah dikuburkan secara massal hampir 100.000 orang tewas dalam beberapa bulan di wilayah ini.

Di Jawa Timur, pasukan militer kurang terlibat dalam kekerasan massal yang dimulai pada periode yang sama. Pasukan RPKAD tidak dikerahkan di wilayah ini, dan pasukan lokal hanya sedikit yang terlibat.[18] Penangkapan tersebut terutama dilakukan oleh organisasi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Permusuhan organisasi keagamaan terhadap komunisme umum terjadi di Indonesia, dan bahkan lebih luas lagi di Asia Tenggara.[19] Namun, di Jawa Timur,

---

[16] Merupakan ayah mertua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

[17] Mengenai provinsi ini, lihat studi Mathias Hammer, The Organisation of the Killings and the Interaction between State and Society in Central Java, 1965, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 32 (3), 2013, Hlm. 37-62. Serta lihat tulisan David Jenkins and Douglas Kammen, ―The Army Para-commando Regiment and the Reign of Terror in Central Java and Bali,‖ di *The Contours of Mass Violence in Indonesia*, ed. Kammen and McGregor, Hlm. 75–103.

[18] Divisi Brawijaya khususnya terpecah dalam sikap yang harus diambil, beberapa pengurusnya yang dekat dengan PNI, khawatir bahwa represi tersebut akan melemahkan legitimasi Presiden Soekarno. Greg Fealy dan Katharine M[illegible]r, ―East Java and the Role of Nahdlatul Ulama in the 1965-1966 Anti-[illegible]ist Violence‖, dalam Douglas Kammen dan Katharine McGregor, *The [illegible]f Mass Violence in Indonesia*, 1965 – 1966, Hlm. 104 – 130.

[19] Seperti yang terjadi di Gereja Katolik di Filipina, pendeta Budha di [illegible] dan para pemimpin Muslim di Malaysia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perlawanan Islam terhadap PKI sangat kuat karena dua alasan utama.[20] Pertama, kenangan pemberontakan Madiun pada September 1948 masih sangat jelas. Kedua, sulitnya penerapan *Land Reform* pada tahun 1960. Pada tahun 1962, gerakan komunis mulai dianggap sebagai ancaman, sehingga kiai[21] setempat mendorong pembentukan milisi yang disebut Banser (Barisan Ansor Serba Guna). Dalam waktu dua bulan, hampir 200.000 orang dibunuh di provinsi ini.

Kebencian terhadap komunis tidak hanya dirasakan oleh organisasi Islam, karena wilayah yang paling menderita akibat kekerasan dan pembunuhan massal adalah Bali. Pada awal Desember 1965, koalisi antara pasukan RPKAD dan milisi PNI yang dikendalikan oleh elit lokal (pemilik tanah luas dan sering adalah sosok Brahmana) menyebabkan kematian sekitar 80.000 orang, pembantaian ini terus berlanjut hingga pertengahan 1966.[22] Kepala Desa sebagai pribadi koalisi sangat berperan dalam proses penangkapan di Bali, karena ia diberikan mandat sebagai pencatat. Kepala Desa memiliki kekuasaan besar sehingga masyarakat menyebutnya sebagai Sang Suratma. Dalam cerita pewayangan Bali, Sang Suratma adalah Dewa yang bertugas mencatat perilaku manusia selama hidup di dunia dan menentukan hukuman serta jenis hukuman bagi roh-roh yang berada di neraka. Kepala desa dianggap sebagai "sang pencatat" yang memiliki peran sentral dalam menentukan nasib manusia. Ketika nama seseorang tercatat dalam

---

[20] Greg Fealy. *East Java and the Role of Nahdlatul Ulama*. *Op cit*. Hlm.

Kata sapaan untuk Alim-Ulama.

Robinson, Geoffrey. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in* nell University Press. Ithaca. 1995 Hlm. 290-292.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

daftar sang pencatat, konsekuensinya bisa sangat serius. Keluarga korban yang terancam sering memberi suap kepada "Sang Suratma" dengan memberikan hasil panen secara cuma-cuma atau setuju untuk bekerja secara gratis jika sang kepala desa membangun rumah.[23]

Sedangkan di wilayah-wilayah di mana komando Angkatan Darat menghadapi dualisme pandangan politik, terjsdi resistensi atau tidak memiliki pasukan yang memadai untuk digerakkan, pembantaian massal ditunda untuk sementara waktu. Namun, kemudian pembantaian tersebut mengalami percepatan dramatis ketika kekuatan yang mendukung posisi anti-komunis menjadi dominan. Di Sumatera Utara, sebagai contoh, baik komandan militer regional Brigadir Jenderal Darjatmo maupun Gubernur Ulung Sitepu memiliki simpati terhadap gerakan kiri, dan sekitar 30% pasukan juga dipandang bersimpati terhadap gerakan tersebut.[24] Akibatnya, terjadi tarik-menarik dengan kekuatan anti-komunis yang menyebabkan penundaan pembantaian massal selama lebih dari satu bulan, pembantaian tidak dimulai sampai beberapa hari setelah 29 Oktober, ketika Darjatmo digantikan oleh Brigadir Jenderal Sobiran, yang digambarkan oleh pejabat Amerika Serikat sebagai seorang anti-komunis yang garang.

Di Provinsi yang sama, tepatnya di Medan, Anwar Kongo sesepuh Pemuda Pancasila, sang penjagal PKI melakukan aksi pengganyangannya menggunakan kawat sebagai senjata andalan dalam pembantaian. Pembunuhan

---

Ngaben tanpa tubuh, Lihat Yurino, Ari, Abidin Zainal, dkk, *Pulangkan Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2012 Hlm. 211.

Geoffrey. *The Dark Side of Paradise. Op cit*. Hlm. 34.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan lilitan kawat menurut Anwar tergolong bersih, tanpa perlu meninggalkan jejak ceceran darah.[25] Aksi Anwar Kongo ini diabadikan dalam Film dokumenter *The Act of Killing* atau Jagal, disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Film tersebut dirilis pada tahun 2012 dan mengangkat penceritaan kembali para pelaku pembunuhan saat melakukan aksi mereka. Film Jagal tersedia daring dan telah memunculkan perdebatan publik yang serius baik di dalam maupun di luar Indonesia. Dalam film tersebut Anwar mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap anggota dan organisasi sayap PKI dalam kurun waktu 1965-1966. Ini pengakuan yang sangat mengejutkan. Sebelumnya tidak pernah ada pelaku yang mengaku melakukan pembantaian terhadap orang yang diduga terlibat PKI.

Di Sulawesi Selatan, penemuan mayat para jenderal mendapat respon paling cepat dari kelompok Islam. Pada tanggal 5 Oktober 1965, atas inisiatif GEMUIS (Generasi Muda Islam) dan 20 organisasi mitranya, mereka mengeluarkan pernyataan mengecam kudeta di Jakarta dan menegaskan dukungan mereka terhadap Presiden Soekarno. Selanjutnya, mereka membangun koalisi bersama Pangdam XIV Hasanuddin, yaitu Brigjen Solichin G P, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya kerusuhan di daerah tersebut.[26]

Dalam menghadapi situasi tersebut, Presiden Soekarno menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Gerakan 30 September dan mendirikan "Dewan

---

Majalah Detik. *Kontroversi Pembantai PKI*. Edisi 1-7 Oktober 2012

Amri, Haruna, Novriadi, Skripsi: ―Penangkapan Anggota PKI dan annya di Makassar Tahun 1965 -1966‖ (Makassar: Universitas din, 2019). Hlm. 41.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Revolusi". Semua pihak diminta untuk menciptakan suasana yang tenang dan menghindari dendam. Soekarno menekankan perlunya menghindari konflik bersenjata atau saling menyalahkan, yang dapat membahayakan persatuan nasional dan pelaksanaan Dwikora. Penyelesaian masalah Gerakan 30 September ditangani secara langsung oleh Presiden Soekarno, aspek militer-administratif didelegasikan kepada Mayjen Pranoto Roksosamodro, sementara aspek militer teknis masalah keamanan dan ketertiban diberikan kepada Mayjen Soeharto.[27] Sejak saat itu, terjadi dualisme kepemimpinan, di mana pemerintahan sah berada di bawah Presiden Soekarno, sedangkan "Pemerintah bayangan" di bawah Komando Soeharto.

Soeharto kemudian mengkonsolidasikan wewenangnya menembus akar-akar pemerintahan daerah dengan membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) pada 10 Oktober 1965. Tugas utama Kopkamtib adalah mengembalikan keamanan dan ketertiban pasca Gerakan 30 September serta memperkuat kewibawaan pemerintah melalui operasi fisik, militer, dan mental. Untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dipimpin oleh Brigjen Solichin G. P, sebagai Penguasa Pelaksana Daerah (PEPELRADA). Melalui Kopkamtib, Soeharto melampaui wewenangnya dengan membubarkan PKI dan membentuk organisasi di bawah Pangkopkamtib untuk menangkap individu yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September.[28] Dari lembaga ini, Soeharto juga

---

Nugroho Notosusanto. *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Sekretariat epublik Indonesia. Hlm. 51.

bid. 30 Tahun Indonesia Merdeka

Optimized using
trial version
www.balesio.com

merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memantapkan posisinya dalam membangun rezim orde baru.

Tanggal 9 Oktober 1965 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran sebanyak 46 Parpol/ormas menuntut pembubaran PKI, dengan membakar habis gedung Kantor Pusat PKI di jalan Keramat Raya, Jakarta.[29] Pemburuan ini tidak terjadi di Pulau Jawa saja, hal yang sama juga berdampak pada seluruh anggota PKI dan organisasi afiliasinya di daerah, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Ada perbedaan jumlah anggota PKI dan simpatisannya yang ditahan di Sulawesi Selatan. Dalam Laporan awal Kodam XIV Hasanuddin 16 Oktober 1968, terdapat 49 tahanan golongan B dari kalangan ABRI, 120 tahanan dari kalangan sipil dan 29 tahanan golongan C dari kalangan sipil dan militer. Sedangkan laporan pemerintah Kotamadya Makassar pada tahun 1985 tentang bekas tahanan G30S di wilayah Dati II sebanyak 2.353 tahanan, Lihat Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Nomor Reg. 937. Sementara ketika kita mengacu pada jumlah tahanan yang sempat diasingkan di Kamp Pengasingan Moncongloe terdapat 911 orang tahanan politik, terdiri dari 52 orang perempuan dan 859 orang laki-laki.[30]

Dengan menggunakan koalisi kesatuan KAP-Gestapu orang-orang yang dicap kiri di Regional Sulawesi Selatan dibersihkan.[31] Keadaan di Makassar

[29] Taufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe. Op cit.* Hlm. 102.

ıihat Arsip pribadi A.M Hustin, mengenai jumlah tapol yang diasingkan ımp Pengasingan Moncongloe.

Massa anti-PKI ini dipelopori oleh mayoritas Pemuda Anshor, HMI dan i pemuda lainnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berangsur berubah menjadi tegang, desas-desus orang-orang yang dianggap PKI dan ormas sayapnya mulai menjadi topik pembicaraan dan incaran kelompok-kelompok yang anti-PKI. Sementara di sisi lain, anggota PKI beserta organisasinya di Makassar belum mengungkapkan pendiriannya terkait peristiwa G30S dan mendukung penuh amanat Presiden Soekarno, mereka cenderung memilih untuk tetap tenang sebagai strategi politik. Meskipun begitu, para anggota pemuda rakyat mulai berkumpul dan berjaga-jaga di kediaman Aminuddin Mukhlis di Jalan Kancil, serta di rumah Paiso (seorang tokoh PKI) dan di sekretariat PKI di Jalan Badak/Onta Baru.[32]

Sikap tenang para anggota PKI dan ormasnya di Makassar ini mengacu pada pernyataan Politbiro CC PKI pada 10 Oktober 1965 dinyatakan sebagai berikut:

> —Hari2 terachir berlawanan dengan amanat2 PJM Presiden Soekarno, agar ditjiptakan suasan tenang dan tertib, dikobarkan orang anti-Komunisme dan anti PKI, sehingga azas Nasakom dan seluruh Pantja Azimat terantjam.
>
> Walaupun demikian, sesuai dengan statement Politbiro CC PKI 5 Oktober 1965 jang mendukung penuh amanat Presiden Soekarno, Panti Abri dan PBR Indonesia, tentang penjelesaian masalah peristiwa 30 September, dengan ini Politbiro CC PKI menjerukan kepada segenap anggota dan simpatisan PKI serta massa anggota ormas2 revolusioner dibawah pimpinan kader2 PKI untuk tidak terperosok kedalam djebakan provokasi kaum jang tidak bertanggung jawab, dan untuk mendjaga persatuan serta mempertadjam kewaspadaan nasional. Diatas segala-galanja jang diperlukan adalah kesediaan menerima, bukan hanja dalam kata2, tetapi djuga dalam perbuatan, dan membantu pelaksanaan amanat2 Presiden Soekarno, masing2 tertanggal 1, dan 3 Oktober 1965, serta garis Sidang Paripurna Kabinet Dwikora 6 Oktober 1965, jang mengharuskan ditjiptakannja suasana tenang dan tertib, tidak

ımri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 42.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

> mengobar-ngobarkan sentiment tuduh menuduh dan salah-menjalahkan, serta mempertjajakan penjelesaian politik pada Presiden Soekarno.
>
> Kepada semua Comite dan anggota PKI serta massa anggota ormas2 revolusioner diinstruksikan untuk tetap berdiri dibarisan terdepan dalam konfrontasi terhadap _Malaysia‘ dan terhadap manuver2 imperialis Inggris dan Amerika Serikat pada umumnja‖.[33]

Angkatan Darat kemudian mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Namun Presiden Soekarno menolak dan tetap teguh pendirian pada filosofi NASAKOM, suatu konsep mendasar tentang masyarakat Indonesia yang bersandar pada tiga unsur politik, yaitu Nasionalisme, Agama dan Komunis. Dalam perspektif Presiden Soekarno, penghapusan PKI akan menimbulkan ketidakseimbangan politik bangsa.[34]

Di Sulawesi Selatan, perlawanan terhadap komunis berkembang dengan cepat. Sejak 5 Oktober, tindakan yang dilambangkan ekspresi kemarahan secara radikal terhadap PKI beserta organisasi massa dan pendukungnya terorganisir dengan baik. Massa anti-PKI dengan agresif menangkap, mendatangi rumah-rumah mereka, dan merusak serta menjarah properti mereka. Karena situasi menjadi semakin tidak terduga, beberapa Kelurahan di Kota Makassar memutuskan untuk melakukan ronda malam mulai dari tengah malam hingga pukul 06.00 sebagai tindakan preventif. Menyikapi kondisi yang tidak diinginkan,

---

[33] Pernyataan Politbiro CC PKI tanggal 10 Oktober 1965 yang menyerukan [illegible] tidak terporovokasi, tetap melaksanakan amanat-amanat PBR Presiden [illegible]. Sumber: IISG, Netherlands dipublikasikan oleh http://www.prog-odules/smartsection/item.php?itemid=348 (diakses pada 10 Februari a pukul 14.00).

[34] [illegible]aufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe. Op cit.* Hlm. 102.

Optimized using trial version www.balesio.com

pada tanggal 7 Oktober 1965, Walikota Makassar, Dg. Pattompo mengeluarkan larangan terhadap semua rapat yang tidak memiliki izin resmi.[35]

Amukan massa anti PKI terus berlangsung. Pada 8 Oktober 1965, aksi massa berdemonstrasi keliling Kota Makassar sambil menggaungkan seruan anti PKI seperti 'ganyang PKI', 'ganyang Aidit', 'bubarkan PKI', dan 'Aidit tailaso'. Sorak-sorai tersebut menjadi jargon utama bagi para demonstran anti-PKI. Selain itu, aksi massa juga melibatkan diri dalam vandalisme terhadap bangunan dengan meninggalkan pesan teror serupa.[36] Tindakan pengganyangan terus berlanjut. Pada 10 Oktober 1965, di mana kebrutalan meluas hingga mencakup penjarahan properti yang dimiliki oleh orang-orang Etnis Tionghoa dan penghancuran rumah penduduk Orang Jawa. Isu semula yang berfokus pada ideologi dan agama, kemudian merambah ke masalah etnis. Para massa demonstrasi tidak hanya memandang keterlibatan PKI dan G30S, melainkan juga memperluas isu ke agama dengan memandang bahwa PKI adalah anti agama, sehingga perlawanan terhadap PKI diartikan sebagai jihad di jalan Allah, jalan yang paling benar.[37]

Cak Gun, seorang pemuda Jawa yang masih remaja, berhasil meloloskan diri dari kejaran massa garang anti-PKI pada saat itu. Setelah itu, dia bersembunyi di sekitar rumahnya.[38] Ketika dia kembali ke rumahnya keesokan harinya, dia

---

[35] Arsip Kotamadya Ujung Pandang Nomor Reg. 853, Bagian Perundang-Undangan Kotapraja Makassar tanggal 7 Oktober 1965 tentang penertiban
lan mengamankan jalannya revolusi

ımri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 44.

'aufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe. Op cit*. Hlm. 112.

Vawancara dengan Cak Gun di Makassar, 22 Agustus 2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menemukan rumah orang tuanya telah dihancurkan. Pada malam pertengahan Oktober 1965, Cak Gun berhasil ditangkap oleh sekelompok tentara dan anggota organisasi massa anti-PKI. Dia kemudian dibawa dan dipenjarakan di sel Kodim 1408 Makassar.

> ―Saat saya ditangkap, itu tepat setelah saya lulus dari SMP. Sampai sekarang, saya masih bertanya-tanya mengapa saya ditahan. Saat itu, saya dipanggil oleh seseorang, mungkin Pak Siregar, di Kodim 1408. Saya masuk ke ruangannya, bingung antara Pak Lubis dan Pak Siregar karena keduanya orang sana. Mungkin saya dipanggil oleh Pak Lubis. Ingatan saya agak buram. Kemudian, terdengar langkah di lantai dua Kodim dengan jelas. "Pagi Pak, saya masuk." Saya duduk di kursi seperti ini, melihat tentara, dan saya ditanya, "Gun, kamu kenal dia?" Tentara itu bertanya, "Apakah kamu mengenal orang ini?" Saya menjawab, "Tidak, Pak". Perhatikan, karena kamu, dia mengatakan, "Ini lihat Gun, lihat ini, celananya pendek, bisa di sini. Jika sudah di sini, jangan berharap bisa keluar". Tentara itu pangkatnya Kopral, kalau tidak salah namanya Pak Saleh‖.[39]

Kekacauan mental yang mereka alami terutama disebabkan oleh konflik batin yang intens, kehilangan martabat, dan hilangnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, tak jarang beberapa tahanan politik seperti Muhsin, Wi Kiong Cheng, Muh. Ali Dg Ngalle, Dg Banta, Sukriah, dan Hafil Kawelong mengalami gangguan mental parah. Kegilaan yang dialami oleh beberapa tahanan politik menjadi bentuk paling parah dari depresi, sementara depresi yang lebih ringan mencakup perasaan putus asa, enggan berinteraksi sosial, merasa terisolasi, dan hilangnya harapan hidup.[40]

> ―Pada saat itu, di dekat rumah teman saya, ada seorang Kopral yang berada di sana tanpa mengenakan seragam, sehingga saya tidak menyadari apakah dia seorang tentara atau bukan. Dia membawa gitar dan

---

Wawancara dengan Cak Gun di Makassar, 22 Agustus 2023

Taufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe. Op cit.* Hlm. 198.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memainkan lagu-lagu jenis musik yang enak didengar, yang orang dulu sebut sebagai Losqueen. Saat itu, tentara tersebut baru menyelesaikan dua lagu. Setelah itu, saya pulang ke rumah melalui lorong, di mana sedang berlangsung acara keagamaan, takziyah kalau tidak salah. Ceritanya seperti ini, 'si Kopral tadi, tanpa mengenakan seragam dan dalam keadaan mabuk, pergi ke acara keagamaan itu sambil berteriak keras, 'Kamu Al-Hadist, Saya Alkohol'." Setelah kejadian itu, saya ditangkap karena diduga sebagai orang yang menyuruh mengucapkan hal tersebut, biang kerok, di acara tersebut, yang mungkin sekarang disebut penistaan agama. Ketakutan membuat saya hanya mengiyakan segala pertanyaan yang dilayangkan oleh interogator saat pemeriksaan di Kodim. Sebelum mengingat peristiwa tersebut, saya mengira bahwa saya di Pemuda Rakyatkan‖.[41]

Setelah diintrogasi di Komando Distrik Militer (Kodim) 1408, Cak Gun kemudian dipindahkan ke penjara. Lalu kemudian dikirim ke Moncongloe pada Juli 1969. Sewaktu di dalam penjara, kehidupan Cak Gun sangat terkungkung, dengan ukuran ruangan yang hanya 3x4 Meter yang kadang diisi sebanyak 15 hingga 20 orang tahanan, bahkan bisa lebih.

Perkembangan gerakan anti komunis terus berlanjut setelahnya. Pada 15 Oktober 1965, kelompok anti PKI yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa menggelar pertemuan di Lapangan Karebosi. Pertemuan ini dihadiri oleh organisasi seperti HMI, Pemuda Anshor, PSII, IPKI, Partai Kristen, Front Pemuda, Front Nasional Daerah, DPRD GR, dan sebagian golongan nasionalis, kecuali PNI. Mereka menuntut pembubaran PKI. Setelah rapat, massa demonstran menuju CC PKI di Jalan Bulu Kunyi. Kemudian, mereka menuju Komtabes Makassar, tempat para anggota PKI dan simpatisannya berlindung. Namun, kerusuhan massa dapat dihindari karena anggota PKI dan simpatisannya sudah ‹an terlebih dahulu ke Kodim 1408 Makassar. Nasib tragis menimpa

Vawancara dengan Cak Gun di Makassar, 22 Agustus 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dokter Soenarso Joso Widagdo, seorang dosen Fakultas Kedokteran Unhas, yang tewas ditikam oleh massa anti PKI pada 17 Oktober 1965. Tuduhannya adalah mendukung kegiatan-kegiatan PKI.[42]

Penangkapan terhadap anggota PKI dan pendukungnya terus berlangsung. Massa anti-PKI menangkap 14 anggota Pemuda Rakyat dan SOBSI di Kecamatan Tallo. Kejadian ini bersamaan dengan kebakaran di Rappojawa pada 21 Oktober 1965. Dua hari setelahnya, Kepala Camat Bontoala menangkap Abdul Aziz, seorang pegawai Kota Praja Makassar, pada 23 Oktober 1965. Penangkapan juga melibatkan aparat militer, dengan beberapa laporan penangkapan terhadap anggota tentara, seperti dua tentara yang ditangkap dengan dugaan terlibat dalam peristiwa G30S pada 22 Oktober 1965.[43]

Berbeda nasib dengan dosen di atas, Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, A.M Hustin, ditangkap setelah mengikuti Kongres III Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) pada 28 September 1965.[44] A.M. Hustin, seorang mantan pengurus CGMI Unhas yang berpartisipasi dalam kongres CGMI di Jakarta pada 28 September 1965. Ia tergabung dalam rombongan bidang olahraga dan seni. Ketika kembali dari kongres tersebut pada awal Oktober 1965, A.M. Hustin bersama dua puluh orang lainnya mengalami penyergapan oleh massa di Pelabuhan Soekarno-Hatta.

---

[42] Amri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 44.

bid. Penangkapan Anggota PKI. Hlm. 51.

elengkapnya,lihat.https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/17/09000 sentrasi-gerakan-mahasiswa-indonesia-cgmi-?page=all (diakses pada 28 024, Pukul 13.00).

Optimized using trial version www.balesio.com

> ―Di sana, kami menunggu kedatangan kapal, namun setelah tiga hari, baru ada kapal patroli polisi, dengan nomor 911, yang melakukan patroli di perairan Makassar. Kami menaiki kapal tersebut dan setelah sampai di Makassar, awalnya kami berencana untuk berlabuh di jembatan, namun karena ada perintah tertentu, kami harus berlabuh ke pelabuhan. Setibanya di sana, mungkin sudah ada informasi yang diterima, sehingga seluruh penumpang diperiksa‖.[45]

Saat itu, A.M. Hustin berhasil mengelabui petugas, karena mengikuti seorang pegawai pelabuhan yang keluar dari area pelabuhan. Setelah tiba di luar pelabuhan, ia langsung menuju rumah keluarganya dan melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya di Barru. Pada 24 Oktober 1965, ia dijemput di rumahnya oleh Pamong Praja Kabupaten Barru dan dibawa ke Kantor Bupati. Sehari kemudian, pada 25 Oktober 1965, ia dibawa ke Polres Barru untuk diperiksa.

> ―Jadi waktu itu kebetulan ada teman saya dari Akademi Maritim, saya ikut dia, tapi rupanya petugas ini sudah mewaspadai memang. Jadi dia ditanya mana kartu mahasiswanya, tidak ada karena tempat kita di Ureka (Universitas Res Publika) dibakar, pakaian kita terbakar, dan rupanya itu kartu mahasiswanya terbakar juga. Terpaksa kita sampaikan bahwa kami rombongan. Akhirnya dipanggil kepala rombongan. Begitu selesai, pegawai pelabuhan berkumpul di sudut pelabuhan. Jadi waktu itu kebetulan saya tidak mabuk di kapal, jadi saya pura-pura *anu*, ada pegawai pelabuhan perempuan dan laki-laki pakaian dinas masuk di kamar mandi. Begitu dia mau keluar saya ikut di situ. Sampai di luar saya lihat oto jip itu dibongkar semua barang-barangnya untuk diperiksa. Jadi saya berdiri-berdiri di situ, padahal sudah setengah tujuh malam. Itu kalau tidak salah. Nah, kebetulan ada pegawai pelabuhan, barangkali sudah mau pulang, tiga orang perempuan dan satu orang laki-laki, saya tunggu dia, begitu dia jalan saya mengikut di sampingnya. Jam 2 malam baru saya tiba di kampung. Kira-kira 3 malam di sini, datang Pamong Praja ambil saya dan di bawa ke kantor daerah. Paginya saya di bawa ke Polres Barru untuk diperiksa‖.[46]

Setelah melalui proses pemeriksaan selama satu minggu, A.M Hustin akhirnya dibebaskan dan diinstruksikan untuk melapor setiap hari Senin di Polres

---

Wawancara dengan A.M Hustin di Barru, 10 Agustus 2023.

Wawancara dengan A.M Hustin di Barru, 10 Agustus 2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Barru. "Saya ditahan di kantor polisi. Setelah seminggu berlalu, saya diminta untuk melaporkan diri setiap Senin di Polres Barru‖.

Pada 6 November 1965, Kodam XIV Hasanuddin mengadakan pertemuan dengan mahasiswa dan kelompok agama di markas komando. Kodam XIV Hasanuddin menyampaikan kepada mahasiswa dan rektor universitas, baik negeri maupun swasta, tentang ancaman terhadap keamanan Pancasila yang dianggap berasal dari PKI dan organisasinya. Di sisi lain, dari kelompok agamais, militer meminta kepada imam masjid dan pendeta gereja untuk mengajukan seruan dalam khotbah agar mengutuk dan membantu menghancurkan PKI dan organisasinya. Tindakan ini terbukti berhasil dalam penyebaran sentimen anti-PKI dan pendukungnya.[47]

Setelah beberapa minggu berselang, situasi Kota Makassar tidak kunjung tertib.[48] Untuk mengatasi situasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar kemudian membentuk Tim Penerangan Gestapu di setiap Kecamatan.[49] Tujuan utama dari pembentukan ini adalah untuk menjaga stabilitas keamanan. Di sisi militer, Brigjen Solichin bertanggung jawab atas pembersihan individu yang diduga terlibat dengan PKI. Bahkan beberapa di antara mereka yang absen sejak tanggal 30 September 1965 dipecat sementara karena dicurigai sebagai anggota PKI atau simpatisannya yang bersembunyi.[50] Tindakan pembersihan ini juga melibatkan

[47] ʌmri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 52.
ʌrsip Kotamadya Ujung Pandang (1926 – 1988) Nomor Reg. 853
ʌrsip Kotamadya Ujung Pandang (1926 – 1988) Nomor Reg. 937.
ʾaufik. *Kamp Pengasingan Moncongloe. Op cit.* Hlm. 117.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perusahaan-perusahaan swasta yang mempekerjakan karyawan yang diduga memiliki afiliasi dengan organisasi SOBSI. Contohnya, dewan pengurus bioskop swasta Sulselra telah melakukan pemecatan terhadap 25 karyawan mereka.[51]

Pada 23 November 1965, Surat Keputusan Pepelrada Sulsel Kep. No. 037/11/PDPP/1965 mengumumkan pembubaran PKI dan organisasi yang terafiliasi di wilayah Sulawesi Selatan.[52] Langkah ini memicu reaksi besar dalam bentuk demonstrasi dari mahasiswa yang mencapai puncaknya pada 27 Januari 1966. Dalam demonstrasi ini, mahasiswa menyerbu dan merebut gedung konsulat RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di Jalan Chairil Anwar yang kemudian dijadikan markas KAMI Sulawesi Selatan. Demonstran melakukan pengrusakan, merampas bendera nasional dan lambang negara dari konsulat, merusak gambar Mao Zedong, menghancurkan kendaraan, dan mencoret-coret tembok dengan kata-kata 'basmi' dan 'ganyang habis konsulat RRT'. Aksi ini kemudian meluas ke rumah, kantor, dan gedung-gedung yang terkait dengan PKI dan organisasinya, bahkan mencapai pengambil alihan gedung-gedung sekolah Tiongkok.[53]

Aksi demonstrasi mahasiswa di Makassar berlanjut pada 28 Februari 1966, ketika mereka melakukan mogok kuliah secara bersama-sama dan beralih berdemonstrasi di jalanan, dengan tuntutan utama untuk pembubaran PKI.[54] Selanjutnya, pada 8 Maret 1966, mahasiswa melakukan rapat siaga bersama

---

[51] Amri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 54.

[52] Amri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 55.

[53] Zainuddin. *Sulawesi Selatan, Dari A. Achmad Rifai ke Achmad Lamo. Op* 74.

[54] Amri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 55.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan militer yang dipimpin oleh Mayor Yasin Limpo sebagai inspektur upacara. Mereka melakukan aksi keliling Kota Makassar sambil menyebarkan pamflet-pamflet mengenai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).[55] Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Jenderal Soeharto pada 12 Maret 1966, PKI secara resmi dibubarkan melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966.[56] Hal ini juga merupakan penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Namun, pembunuhan terus berlanjut selama hampir enam bulan. Pertikaian yang serius, seperti yang terjadi di Jawa Timur, juga muncul dalam berbagai koalisi anti-komunis: hubungan antara angkatan laut dan polisi di satu sisi, dan tentara di sisi lain, semakin tegang.[57]

Di Makassar, pada 16 Maret 1966, di Lapangan Karebosi, digelar rapat akbar yang membacakan keputusan presiden mengenai pembubaran PKI dan organisasinya dari tingkat pusat hingga daerah. Rapat ini dihadiri oleh Panglima Dejahit Madjajah Askari, Panglima Kodam Brigjen Solichin G.P, Gubernur Sulawesi Selatan Brigjen A. Rifai, dan Walikota Makassar Mayor M. Dg. Patompo.[58] Kejadian ini menjadi momentum keberhasilan bagi pihak militer AD dan semua kelompok afiliasinya yang menentang PKI.

---

[55] Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu: Bubarkan PKI dan Ormas-ormasnya, Retool/rombak Kabinet Dwikora, dan Turunkan harga. Aksi-aksi mahasiswa ini didukung TNI-AD, khususnya Kostrad, sementara Angkatan Laut dan AURI, masih tetap loyal kepada Presiden.

[56] Koran Wacana Bernas Jogja, *Supersemar: Sejarah dalam balutan n*,12 Maret 2014.

Douglas Kammen and Katharine McGregor. *The Contours of Mass in Indonesia, 1965-1968, Op cit*. Hlm. 19.

ımri. Penangkapan Anggota PKI. *Op cit*. Hlm. 57.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pada bulan Oktober 1966, kurang lebih setahun setelah ―Kudeta 30 September‖, pembantaian terakhir terjadi. Kekerasan tersebut kemudian memasuki fase terakhirnya (yang berlangsung selama dua tahun berikutnya) yang mengakibatkan pemenjaraan ratusan ribu orang yang terkait dengan rezim Soekarno, namun juga, dan untuk pertama kalinya, sejumlah pertempuran bertujuan untuk mengurangi perlawanan yang telah terbentuk, di daerah-daerah bekas basis PKI di pedesaan, khususnya di Jawa. Lebih dari satu juta lima ratus ribu orang ditangkap dan pada tahun 1969, hampir seratus ribu orang masih dipenjara. Beberapa dari mereka ditangkap beberapa tahun setelah serangan tersebut dan yang lainnya tetap di penjara hingga empat belas tahun sambil menunggu persidangan yang hanya sebatas angan.[59]

Dengan dibubarkannya PKI secara legal, para milisi sipil anti-PKI dan militer menggalakkan penangkapan dan pemberangusan para anggota maupun orang-orang yang disinyalir berafiliasi dengan PKI di Sulawesi Selatan. Pada akhir 1966, penangkapan besar-besaran terhadap anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) atau yang dituduh sebagai anggota BTI di Takalar mulai dilakukan aparat militer dengan dibantu kelompok anti-PKI dan pihak kecamatan maupun desa. Penangkapan dan penggeladahan rumah anggota BTI dilakukan, namun karena ada isu penangkapan telah tersebar, anggota BTI tidak satu per satu ditangkap, tetapi mereka dipanggil secara bersamaan melalui daftar nama yang dibuat aparat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ihat laporan Amnesty International, Power and Impunity: *Human Rights* *New Order*, London, Amnesty International Publications, 1994.

desa bekerja sama dengan pihak kecamatan dan keamanan. Nama-nama ini diumumkan melalui mesjid.[60]

Penangkapan sewenang-wenang tanpa proses identifikasi yang jelas terhadap masyarakat yang dianggap terlibat atau bagian dari BTI banyak terjadi di Galesong. Sedangkan penangkapan sewenang-wenang anggota masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan BTI pun dilakukan, seperti pengalaman Sahabang Dg. Muntu, tapol di Galesong. Penangkapan terhadap dirinya terjadi karena tidak memilih Calon Kepala Desa terpilih yakni Arsyad Dg. Boko, saat pemilihan kepala Desa Bontolebang.[61] Seluruh tapol yang berhasil ditangkap kemudian di bawa ke Koramil untuk menjalani introgasi di bawah ancaman tentara. Setelah tahap introgasi selesai, para tapol kemudian di foto satu persatu dan dipaksa menandatangani atau cap jempol, serta wajib memasukkan semua identitas keluarga. Anggota biasa BTI kemudian diperbolehkan pulang ke rumah dan diwajibkan lapor ke Koramil dan atau ke Kodim Takalar. Khusus pimpinan BTI, mereka ditahan selama sebulan.[62] Tapol Galesong tidak ada yang dikirim ke Kamp Moncongloe dan mereka hanya dikenakan wajib lapor sampai 1989.[63]

---

[60] Namun keesokan harinya, kelompok anti-komunis semakin masif melakukan pengganyangan terhadap anggota BTI di Galesong. Beragam tindakan kekerasan yang mereka lakukan yakni merobohkan rumah Dg Bella di Kampung Beba, Galesong, mengakibatkan dua anaknya yang masih bayi meninggal dunia karena ketakutan dan ayah mertuanya cacat seumur hidup karena disuruh melompat dari atas rumah panggung dalam keadaan sakit. Yurino, Ari, Abidin Zainal, dkk. *Op cit*. Hlm. 171.

bid. Pulangkan Mereka! Hlm. 172.

rsyad Dg. Beta adalah ketua BTI Galesong.

elama masa wajib lapor, para tapol Galesong dieksploitasi tenaganya mbangun berbagai jalan dan fasilitas umum di Galesong, tanpa diupah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pada sekitar tahun 1967, A.M Hustin ditangkap kembali oleh Teperda (Team Pemeriksa Daerah) dan dibawa ke Kodim 1405 Pare-pare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani proses pemeriksaan selama sekitar 20 hari, A.M Hustin akhirnya dipenjarakan atas perintah Kodim 1405 Pare-pare dengan alasan diamankan.

> ―Di Kodim 1405 Pare-Pare, saya diperiksa awal di situ, saya ditanya, ada keluarga di sini? Saya jawab iya, dia bilang ada telponnya, saya bilang ada. Jadi di situ saya dulu dititip. Jadi setiap jadwal pemeriksaan saya datang. Jadi saya dititip di Pare-pare di rumah keluarga saya punya om‖.[64]

Pada saat ditahan di Kodim tersebut, A.M Hustin dipekerjakan di rumah Komandan Kodim Hamid Ali selama sepekan. Dia bertugas layaknya Asisten Rumah Tangga (ART) mencuci, memasak, dan membersihkan rumah.

> ―Tahanan politik dimanfaatkan tenaganya, pertama untuk pembangunan dermaga pelabuhan Pare-Pare, pembongkaran kuburan Cina di Lakessi, dan pembangunan jembatan merah. Seluruh pekerjaan jalan raya juga dikerjakan oleh tahanan politik, tanpa digaji. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan, baik secara langsung maupun halus, sering terjadi. Kita di sana melakukan pekerjaan berat seperti mengambil kerikil dan batu di Sungai Bojo material untuk jalan raya, kita lihat matahari terbenam kita lihat terbit, kerja keras pokoknya tidak pernah berhenti itu, sudah penuh satu mobil ehh datang lagi. Pokoknya itu pembangunan di Pare-Pare, termasuk Jalan Pelita. Tapol juga dikirim ke Rappang, untuk membangun *Home Base* di Korem Rappang, *Home Base* Palanro dan Kodim Patanroange. Pokoknya kerja saja tanpa gaji‖.[65]

Kesewenang-wenangan para massa anti-PKI semakin garang, bahkan orang-orang yang tidak tahu menahu tentang PKI juga ikut ditangkap. Seperti

---

sepeserpun. Lihat Yurino, Ari, Abidin Zainal, dkk. *Pulangkan Mereka! ai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi okasi Masyarakat (ELSAM), 2012. Hlm. 181.

Wawancara dengan A.M Hustin di Barru, 10 Agustus 2023

Wawancara dengan A.M Hustin di Barru, 10 Agustus 2023

Optimized using trial version www.balesio.com

yang dialami Pasrah,[66] mantan tapol yang tidak ingin disebutkan namanya, ia hanyalah seorang pedagang sayur di Pasar Lakessi Pare-Pare, lalu kemudian dituduh sebagai kader Pemuda Rakyat, diperkuat dengan surat pemanggilan dirinya untuk menghadap ke Kodim Pare-Pare sekitar tahun 1970-an.

> ―Saya mendapat surat panggilan untuk datang ke Kantor Kodim menghadap. Sekitar tahun 1970-an, saya ditangkap. Saya tidak mengetahui secara pasti apa maksud dari pemanggilan itu, jadi saya hanya mengikuti perintah dan pergi ke sana. Saya tidak tahu apa yang akan saya sampaikan atau apa yang akan dijelaskan kepada saya di sana. Saat saya melihat situasi, saya lebih memilih untuk menyerah daripada berjuang lebih lanjut‖.[67]

Pasrah menyadari bahwa keadaan di Pare-Pare saat itu tidak stabil, sehingga mengindahkan surat panggilan tersebut dengan pasrah adalah cara untuk menyelamatkan diri, walaupun dasar dari pemanggilan tersebut adalah keliru. ―Nanti saya tahunya kalau saya difitnah itu di dalamji, bertemu tahanan. Baru saya tahu oh begini *pale*‖.

> ―Saya menerima segala keadaan dengan pasrah, apa pun yang terjadi. Sementara itu, ketika ibu saya datang menjenguk, saya bilang padanya ―bahwa saya sebagai laki-laki harus menghadapi ini, dan saya tidak ingin menyusahkan orang lain‖. Selama diintrogasi di Kodim, saya tidak pernah dipukul, mungkin karena introgatornya merasa iba terhadap saya karena saya masih anak-anak, belum dewasa dan korban fitnah‖.[68]

Mendekati Pemilu 1971, sejumlah tahanan politik yang ditahan di Kodim Pare-pare diangkut menggunakan truk lalu dipindahkan ke Kamp Moncongloe.

---

[66] Pasrah adalah nama samaran yang menggambarkan sikap dan tutur kata informan. Informan ini merahasiakan nama aslinya

[67] Wawancara dengan Pasrah (nama samaran) di Pare-Pare, 15 September

[68] Wawancara dengan Pasrah (nama samaran) di Pare-Pare, 15 September

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Setibanya di sana, tapol dari berbagai daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara sudah lebih dulu diasingkan. Kamp Moncongloe, menurut A.M Hustin adalah Pulau Buru versi Sulawesi Selatan.

> ―Menjelang pemilihan umum tahun 1971, dibawa ke Moncongloe, itu satu truk. Jadi nanti di sana kita tahu kalau ini namanya Moncongloe. Soalnya tidak ada yang tanya, diam semua. Mau dibawa ke kubur boleh. Tidak ada berani tanya-tanya bilang mau ke mana.[69] Di sini pernah menampung sekitar 900 orang tapol dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Tenggara‖.[70]

Dalam konteks kekerasan dan pemberangusan, istilah PKI digunakan untuk mengacu pada anggota PKI dan individu yang terkait dengan "organisasi yang berafiliasi" dengan PKI. Selain itu, label PKI juga dipakai untuk menggambarkan anggota keluarga kader PKI serta keluarga dari anggota organisasi yang terafiliasi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

---

*N*awancara dengan Pasrah (nama samaran) di Pare-Pare, 15 September

*V*awancara dengan A.M Hustin di Barru, 10 Agustus 2023

PDF
Optimized using
trial version
www.balesio.com